

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Dikdik M., Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2013, *Proyeksi Penduduk Indonesia "Indonesia Population Projection" 2010-2035*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Statistik Indonesia "Statistical Yearbook of Indonesia" 2020*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Fajar, Mukti, *et al.*, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hoefnagels, Gerardus Petrus, 1973, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Springer Science+Business Media, New York.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, *Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, *Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2019, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta.
- Krisnayuda, Backy, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, 2009, *Kebijakan Pro Gender*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta.
- Rachman, Alwy, 1998, *Gelas Kaca dan Kayu Bakar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Tenggok, M. Ikhsan, 2000, *Jalan Keselamatan melalui Agama Khonghucu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Artikel Jurnal:**

Abdillah, Masykuri, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia", *MIQOT*, Vol. XXXVIII, No. 2, Juli-Desember 2014.

Abidin, Nur Fatah, "Pancasila sebagai *The Living Values* dalam Pengalaman Sejarah Kebangsaan Indonesia", *Jurnal Candi*, Vol. 20, No. 1, Maret 2020.

Ali, Mahrus, "*Overcriminalization* dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustu*, Vol. 25, No. 3, September 2018.

Aprilianda, Nurini, *et.al.*, "Unsur Subsosialitas Kriminalisasi Perbuatan pada Pasal 55 dan 56 Undang-Undang tentang Akuntan Publik", *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 1, April 2013.

Ariyani, Vivi, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi", *Holrev*, Vol.3, Issue 2, September 2019.

Dewi, Vitriyana Kusuma, Gayung Kasuma, "Perempuan Masa Orde Baru Studi Kebijakan PKK dan KB Tahun 1968-1983", *Verleden Jurnal Kesejarah*, Vol. 4, No.2, Juni 2014.

Gedeona, Hendrikus Tri Wibawanto, "Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi di Tengah Kekuatan Modal", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2, 2004.

Haryadi, Dwi, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan di Transportasi Umum", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 16, No. 1, Mei 2012.

Hasanuddin, Iqbal, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls", *Refleksi*, Vol. 17, No. 2, Oktober 2018.

Hermansyah, Adi, "Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Agustus 2013.

Kenedi, John, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Menyejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.

- Linarwati, Mega, et al., "Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia serta Penggunaan Metode *Behavioral Event Interview* dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus", *Journal of Management*, Vol. 2 No. 2, Maret 2016.
- Luthan, Salman, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6, No. 11, 1999.
- Maulani, Diah Gustiniati, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari-April 2013.
- Mazjah, Raden Muhamad Ibnu, "Pertanggungjawaban Pers Nasional sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Tanggungjawab Korporasi", *Era Hukum Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2018.
- MD., Moh. Mahfud, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1, Januari 2007.
- Muwahid, "Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, September 2015.
- Negara, Purnawan D., "Membangun Hukum Berbasis Nilai-Nilai Indonesia (Tinjauan Prismatic Hukum sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berbasis Pancasila)", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, April 2013.
- Priyadi, Sari, et al., "Alat Kontrasepsi dan Aktivitas Seksual Sebagai Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Keputihan", *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 5, No. 3, September 2017.
- Purwanto, "Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 1, No. 1, Februari 2020.
- Putri, Puri Kusuma Dwi, "Kelembagaan dan Capaian Program Keluarga Berencana (KB): Dari Era Sentralisasi ke Desentralisasi", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019.
- Rahayu, Derita Prapti, "Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia", *Yustisia*, Vol. 4 No. 1, Januari-April 2015.
- Rahmawati, Nur Ainiyah, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*", *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1 Januari-April 2013.

- Sakina, Ade Irma, Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Share Social Work Jurnal*, Vol. 7, No. 1, Juli 2017.
- Setiawati, Erna, *et al.*, "Pemilihan Kontrasepsi Berdasarkan Efek Samping Pada Dua Kelompok Usia Reproduksi", *Unnes Journal of Public Health*, Vol. 6, No. 3, Juli 2017.
- Sitepu, Sudirman, "Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal", *Syiar Madani*, Vol. VIII No. 3, November 2006.
- Soekanto, Soejono, "Beberapa Faktor Sosial-Budaya yang Mempengaruhi Keadilan Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 1971.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014.
- Suartha, Nyoman, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan dan Implementasi Kebijakan Penduduk di Provinsi Bali", *PIRAMIDA*, Vol. XII, No. 1, Juli 2016.
- Sugiarto, Totok, "Analisis Terhadap Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 5, No. 2 Desember 2014.
- Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2015.
- Wertheimer, Alan, "*Should Punishment Fit the Crime*", *Social Theory and Practice*, Vol. 3, No. 4, Fall 1975.
- Yusrizal, "Penegakan Hukum Penanganan Gelandangan dan Pengemis Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 2, Desember 2012.
- Zubaedah, Siti, "Mengurai Problematika Gender dan Agama", *Jurnal Studi Gender dan Anak Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto YINYANG*, Vol. 5 No. 2 Jul-Des, 2010.

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir:**

Ariani, Rully Faradhila, 2019, Analisis Kebijakan Formulasi Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Avista, Meyvia Winda, 2010, *The Urgency to Regulate Sexual Violence in Indonesia Special Criminal Law*, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dheanasti, Nadia Priski, 2019, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2019, Korban Bersuara, Data Berbicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018, *Hasil Penelitian*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta.

### **Seminar:**

Danes, Vennetia R., "INFID Webinar *Series* Perempuan dan COVID 19 #4", Webinar, Saluran Youtube INFID TV, 26 Juni 2020.

Hiariej, Edward O.S., "Apa Pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Hukum Pidana Khusus dalam Konteks Keadilan untuk Korban?", Webinar, Saluran Youtube Kanal Pengetahuan FH UGM, 6 Agustus 2020.

### **Koran:**

INFID, "Surat Terbuka Dukungan Percepatan Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual", *Koran Tempo*, 16 Juli 2020.

### **Internet:**

Adrian, Kevin, "Kenali Jenis dan Cara Memilih Alat Kontrasepsi yang Tepat", <https://www.alodokter.com/memilih-alat-kontrasepsi>, diakses 18 Januari 2021.

- Aldrian, Kevin, "Apakah Vasektomi Bisa Memengaruhi Performa Seks?", <https://www.alodokter.com/vasektomi-pada-pria-bisa-ganggu-performa-seks>, diakses 10 Agustus 2020.
- Anam, Saiful, "Legal Opinion: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum", <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 25 Mei 2020.
- Amnesty Internasional, "Empat Urgensi Pengesahan RUU PKS", <https://www.amnesty.id/empat-urgensi-pengesahan-ruu-pks/#:~:text=RUU%20PKS%20tidak%20hanya%20melindungi,rehabilitasi%20bagi%20pelaku%20kekerasan%20seksual>, diakses tanggal 19 Januari 2021.
- Cahyo, Nurhadi, "Pemaksaan Pemasangan Alat Kontrasepsi Bagi Difabel Tidak Dibenarkan", <https://www.voaindonesia.com/a/pemaksaan-pemasangan-alat-kontrasepsi-bagi-difabel-tidak-dibenarkan/4230938.html>, diakses 14 Agustus 2020.
- Change.org, "Sahkan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual), Penuhi Hak Korban)", <https://www.change.org/p/dpr-ri-sahkan-ruu-p-ks-penghapusan-kekerasan-seksual-penuhi-hak-korban-sahkanruupks>, diakses 19 Januari 2021.
- \_\_\_\_\_, "Sahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. #MulaiBicara #GerakBersama", <https://www.change.org/p/dpr-ri-sahkan-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-mulaibicara>, diakses tanggal 19 Januari 2021.
- Detikhealth, "Sterilisasi, Bentuk Lain Kekerasan pada Perempuan Positif HIV", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2682804/sterilisasi-bentuk-lain-kekerasan-pada-perempuan-positif-hiv>, diakses 19 Februari 2021.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual per tanggal 31 Januari 2017", <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>, diakses 11 Oktober 2020.
- \_\_\_\_\_, "Tentang DPR: Tugas dan Wewenang", <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses 2 September 2020.
- Fadli, Rizal, "Cara Cegah Penularan HIV dari Ibu Hamil ke Janin", <https://www.halodoc.com/artikel/cara-cegah-penularan-hiv-dari-ibu-hamil-ke-janin>, diakses 13 Agustus 2020.



Good News From Indonesia, "Tahukah Anda, Seberapa Luas Indonesia?", <https://www.goodnewsfromindonesia.id/infographic/tahukah-anda-seberapa-luas-indonesia>, diakses 19 Juli 2020.

Hadi, Ilman, "Mengenal Hukum Tutupan", [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/#:~:text=Pidana%20tutupan%20merupakan%20salah%20satu,Pidana%20\(%E2%80%9CKUHP%E2%80%9D\).&text=\(1\)%20Dalam%20menga dili%20orang%20yang,hakim%20boleh%20menjatuhkan%20hukuman%20tu tupan](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/#:~:text=Pidana%20tutupan%20merupakan%20salah%20satu,Pidana%20(%E2%80%9CKUHP%E2%80%9D).&text=(1)%20Dalam%20menga dili%20orang%20yang,hakim%20boleh%20menjatuhkan%20hukuman%20tu tupan), diakses 10 Januari 2021.

Halim, Devina, "FPL: 9 Jenis Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Nyata Terjadi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/01/18423681/fpl-9-jenis-tindak-kekerasan-seksual-dalam-ruu-pks-nyata-terjadi?page=all>, diakses tanggal 18 Januari 2021.

Harding, Mary, "Contraception Methods: Birth Control", <https://patient.info/sexual-health/contraception-methods>, diakses 6 Februari 2020.

Honestdocs, "10 Alat Kontrasepsi Paling Populer di Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190603144216-255-400670/10-alat-kontrasepsi-paling-populer-di-indonesia>, diakses 4 Januari 2019.

Hukumonline, "Ini Beda Kriminalisasi, Over Kriminalisasi dan Dekriminalisasi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5861c1c99e1/ini-beda-kriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminalisasi?page=all>, diakses 20 Juni 2020.

Hukumonline, "Rancangan Undang-Undang 2019 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", <https://pusatdata.hukumonline.com/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/pusatdata/viewfile/lt5d848249cf949/parent/17797>, diakses tanggal 7 November 2020.

Jurnal Perempuan, "Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/urgensi-pengesahan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses tanggal 19 Januari 2021.

Kamus Hukum Online Indonesia, "Ad Hoc", <https://kamushukum.web.id/arti-kata/adhoc/>, diakses 21 Juni 2020.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Glosary Ketidakadilan Gender", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23>, diakses 9 Agustus 2020.



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani! 15 Bentuk Kekerasan Seksual", <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual>, diakses 2 Juni 2020.

---

\_\_\_\_\_, "Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat", <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>, diakses 13 Agustus 2020.

---

\_\_\_\_\_, "Siaran Pers Komnas Perempuan Wujudkan Hak Korban, Tetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Prolegnas Prioritas 2021 (6 Oktober 2020)", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-wujudkan-hak-korban-t>, diakses tanggal 19 Januari 2021.

Kusnaedi, Dedy, "Pemaksaan Penggunaan Alat Kontrasepsi adalah Kekerasan Seksual (KS)", <http://www.gresnews.com/berita/hukun/77113-pemaksaan-penggunaan-alat-kontrasepsi-adalah-kekerasan-seksual-ks/>, diakses 10 Januari 2020.

Noya, Allert Benedicto Ieuan, "Ingin Tahu Efek Samping Pil KB?", <https://www.alodokter.com/ingin-tahu-efek-samping-pil-kb>, diakses 13 Agustus 2020.

Perwitasari, Nur Hidayah, "15 Jenis Kontrasepsi dan Efek Sampingnya: Kondom, IUD Hingga Pil KB", <https://tirto.id/15-jenis-kontrasepsi-dan-efek-sampingnya-kondom-iud-hingga-pil-kb-ejAd>, diakses 6 Februari 2020.

Ramadhan, Muhammasd Iqbal, "Usia Ideal Anak untuk Mulai Diberikan Edukasi Seks", <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3259227/usia-ideal-anak-untuk-mulai-diberikan-edukasi-seks>, diakses 29 Desember 2020.

Riadi, Muchlisin, "Pengertian, Ukuran dan Asas Kriminalisasi", <https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminalisasi.html#:~:text=Tujuan%20kriminalisasi%20adalah%20menciptakan%20ketertiban,kerusakan%20meluas%20dan%20menimbulkan%20korban>, diakses 14 Januari 2020.

Taylor, Gloria Safira, "Memahami Efek Samping dan Manfaat Alat Kontrasepsi", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170426202231-255-210413/memahami-efek-samping-dan-manfaat-alat-kontrasepsi>, diakses 19 Oktober 2020.

The Body Shop, "Semua Peduli, Semua Terlindungi. Stop Sexual Violence!", [https://www.tbfightforsisterhood.co.id/?gclid=EAIaIQobChMlKCj1Min7gIVl3ZgChIzwQ92EAAYASAAEgIdCPD\\_BwE](https://www.tbfightforsisterhood.co.id/?gclid=EAIaIQobChMlKCj1Min7gIVl3ZgChIzwQ92EAAYASAAEgIdCPD_BwE), diakses 19 Januari 2021.

Wahyudi, Ikhwan, "Pemilihan Alat Kontrasepsi Kewenangan Suami atau Istri?", <https://sumbar.antaranews.com/berita/250825/pemilihan-alat-kontrasepsi-kewenangan-suami-atau-istri->, diakses 9 Maret 2020.

### **Konvensi Internasional:**

Rome Statute of the International Criminal Court (United Nations, Treaty Series, Vol. 2187, No. 38544).

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Diumumkan dengan Maklumat tanggal 1 Januari 1918, *Staatsbald* Tahun 1915 Nomor 732).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus*, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1614).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135).

Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Januari 2014.